

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sudah menyebar lebih dari 200 negara di Asia, Eropa, Amerika Dan Australia yang menjadi pandemi setelah diumumkan oleh World Health Organization (WHO). Pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak negatif pada ekonomi domestik dalam suatu negara (Amri, 2020). Pembatasan aktivitas pada masyarakat untuk mengupayakan penanganan Covid-19 sudah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Sektor-sektor yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 yaitu sektor transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya, tetapi sektor ekonomi terkena dampak yang paling tinggi oleh Covid-19 yaitu pada sektor industri rumah tangga (Susilawati et al., 2020). Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebanyakan dari usaha kecil yang terdampak oleh krisis Covid-19, menyebabkan banyak usaha yang pada akhirnya harus ditutup untuk sementara waktu, dan terkendala pada arus kas (Baker & Judge, 2020).

UMKM sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional berperan penting bagi pemulihan ekonomi di Indonesia. Komitmen dari pemerintah untuk tetap memberikan dukungan pada UMKM agar dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang di tengah tantangan pandemi dan melakukan transformasi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM merasakan kesulitan dalam permodalan pada saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan kepada KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM terkendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19 (BPS, 2021).

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sudah dijadikan sebagai prioritas pada pembangunan ekonomi skala nasional. Hal ini selain disebabkan oleh UMKM yang telah menjadi tulang punggung dalam sistem ekonomi kerakyatan yang bukan hanya ditujukan untuk dapat meminimalisir permasalahan pada ketimpangan yang terjadi diantara pelaku usaha dan golongan

pendapatan, ataupun dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan dan penyerapan pada tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UMKM dapat memperluas basis ekonomi dan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam percepatan untuk perubahan struktural, yaitu dengan peningkatan pada perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Hutahaean, 2020).

Tabel 1. 1 Data Pendapatan Industri Mikro Kecil Provinsi Sumatera Barat 2018-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)

Kota / Kabupaten	2018	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	126,962,005	59,010,656	66,181,677
Kab. Pesisir Selatan	788,256,573	906,398,917	828,972,985
Kab. Solok	879,754,233	963,561,408	667,335,907
Kab. Sijunjung	167,346,743	192,822,180	171,909,941
Kab. Tanah Datar	5,163,615,750	528,275,983	601,703,086
Kab. Padang Pariaman	859,900,362	653,441,633	447,423,438
Kab. Agam	797,256,498	946,789,132	741,532,459
Kab. Lima Puluh Kota	1,257,312,923	1,184,794,146	929,245,946
Kab. Pasaman	341,259,805	350,797,925	783,853,704
Kab. Solok Selatan	235,936,392	158,784,025	420,029,092
Kab. Dharmasraya	235,434,268	299,393,042	220,005,461
Kab. Pasaman Barat	1,059,699,227	604,724,473	391,839,559
Kota Padang	2,278,461,032	2,051,004,642	1,797,708,968
Kota Solok	71,704,775	147,260,134	89,941,393
Kota Sawahlunto	84,554,249	129,052,608	144,875,840
Kota Padang Panjang	210,101,207	253,526,430	239,601,613
Kota Bukittinggi	328,251,671	305,214,676	242,727,319
Kota Payakumbuh	598,151,695	615,638,169	590,468,061
Kota Pariaman	312,245,790	330,738,919	171,954,357
Provinsi Sumatera Barat	15,796,205,198	10,681,229,095	9,547,310,806

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 diketahui bahwa pada tahun 2018 pendapatan industri mikro kecil di Kota Padang yaitu sebesar Rp. 2.278.461.032.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.051.004.642.000 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.797.708.968.000. Kemudian pada Kota Pariaman di tahun 2018 sebesar Rp. 312.245.790.000, kemudian pada tahun 2019 mengalami

peningkatan menjadi Rp. 330.738.919.000, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat jauh menjadi Rp. 171.954.357.000 (BPS, 2021).

Tabel 1. 2 Data Jumlah Industri Mikro Kecil Provinsi Sumatera Barat 2018-2020

Kota / Kabupaten	2018	2019	2020
Kab. Kepulauan Mentawai	988	404	325
Kab. Pesisir Selatan	7.309	5.127	5.1
Kab. Solok	4.829	5.589	5.787
Kab. Sijunjung	2.391	1.935	1.78
Kab. Tanah Datar	12.011	7.124	6.75
Kab. Padang Pariaman	6.794	7.999	7.003
Kab. Agam	15.485	14.801	14.625
Kab. Lima Puluh Kota	19.957	16.865	16.469
Kab. Pasaman	3.512	4.383	4.407
Kab. Solok Selatan	1.978	1.37	1.389
Kab. Dharmasraya	2.198	2.769	2.622
Kab. Pasaman Barat	3.628	6.21	5.668
Kota Padang	14.754	10.81	8.117
Kota Solok	983	1.537	1.396
Kota Sawahlunto	1.815	1.873	1.901
Kota Padang Panjang	1.571	1.565	1.41
Kota Bukittinggi	2.81	3.316	3.182
Kota Payakumbuh	3.201	3.697	3.515
Kota Pariaman	2.374	3.338	3.048
Provinsi Sumatera Barat	108.588	100.712	94.494

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data diatas yang dikeluarkan oleh BPS Sumatera Barat pada tahun 2022 diketahui bahwa jumlah industri mikro kecil di Kota Padang berjumlah sebanyak 14.754, kemudian pada tahun 2019 terdapat sebanyak 10.810, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 8.117. Selanjutnya jumlah industry mikro kecil di Kota Pariaman pada tahun 2018 terdapat sebanyak 2.374, kemudian pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3.338, kemudian pada tahun 2020 terdapat sebanyak 3.048.

Dengan banyaknya kasus Covid-19 yang terjadi memberikan pengaruh yang cukup luas dan besar pada lapisan masyarakat, dampak negatif atau buruk

yang dirasakan bagi perekonomian Indonesia dan memberikan penurunan pada tingkat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan penurunan pada tingkat konsumsi maka akan berakibat pada ketimpangan pada indikator-indikator dalam laju perekonomian (Rosita, 2020).

Dengan adanya wabah covid-19 ini membuat konsumsi dan daya beli masyarakat mengalami penurunan, ruang gerak masyarakat pun terbatas dikarenakan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat kalangan menengah kebawah. Tuntutan untuk tidak keluar rumah, sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar pergi bekerja. Hal tersebut berpengaruh pada UMKM yang ada. Dengan pembatasan tersebut tentunya telah menurunkan jumlah pembeli ataupun pengunjung yang akhirnya berdampak pada penurunan tingkat pendapatan pada pelaku UMKM. Penurunan pendapatan pada pelaku UMKM menjadi penyebab terjadinya penurunan pada jumlah UMKM yang ada, sementara keberadaan dari UMKM sangat penting dikarenakan UMKM adalah bentuk usaha yang berperan penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) pada suatu negara khususnya di Indonesia (Rosita, 2020).

Dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor UMKM, bisa dimulai dengan memberdayakan usaha kecil yang ada di daerah, hal ini dilakukan karena pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. pada umumnya bertumbuh secara langsung dari masyarakat. Beberapa pemerintah di daerah sudah dilaksanakan (Rifai, 2013). MENKOPUKM telah melakukan himbuan pada berbagai pihak masyarakat, swasta, dan BUMN dalam memberikan bantuan supaya UMKM tetap melakukan produksi ditengah situasi pandemi Covid-19. Berbagai keluhan yang diterima yaitu, penurunan pada penjualan, bahan baku yang sulit didapat, hambatan pada distribusi, mengalami kesulitan pada permodalan, dan terjadinya hambatan pada produksi (Carolin, 2020).

Tabel 1. 3 Pendapatan Pelaku Usaha UMKM di Kota Padang dan Kota Pariaman

No	Jenis Usaha Kota Padang	Omset		Pertumbuhan (%)
		Sebelum	Selama	
1	Warung Kebutuhan harian	6.000.000	5.000.000	17%
2	Usaha Menjahit Seprai	5.000.000	4.000.000	20%
3	Jualan Makanan	2.500.000	2.000.000	20%
4	Jualan Lontong	2.000.000	1.000.000	50%
5	Jajanan Pasar Tradisional	1.200.000	800.000	33%
No	Jenis Usaha Kota Pariaman	Omset		Pertumbuhan (%)
		Sebelum	Selama	
1	Warung Barang Harian	3.500.000	3.000.000	14%
2	Laundry	2.500.000	1.200.000	52%
3	Usaha Ladu	2.500.000	2.280.000	9%
4	Warung Sayuran	4.000.000	3.600.000	10%
5	Sulaman	1.000.000	400.000	60%

Sumber : INBISTEK Unand, 2022

Berdasarkan data pendapatan pelaku usaha UMKM di Kota Padang dan Kota Pariaman diketahui bahwa omset berbagai jenis usaha di Kota Padang dan Pariaman mengalami penurunan selama masa Pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan pendapatan dari pelaku usaha sebelum dan selama Covid-19. Jenis usaha yang mengalami dampak tertinggi di Kota Padang yaitu usaha jualan lontong dengan persentase penurunan sebesar 50%, kemudian di Kota Pariaman yang mengalami dampak penurunan tertinggi yaitu pada usaha sulama sebesar 60%. Terjadinya penurunan pada jumlah pendapatan dari berbagai jenis usaha menjadi permasalahan baru yang harus diatasi.

Salah satu program mengatasi permasalahan berkenaan rendahnya pendapatan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. Berdasarkan keputusan Menteri Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan yang menjadi pengembangan

sistem perlindungan sosial yang dikhususkan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Sebagai bentuk pengupayaan dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai yang bersyarat, pada jangka pendek PKH diharapkan untuk dapat mengurangi beban pengeluaran pada keluarga miskin (KM). Pada jangka menengah PKH diharapkan untuk dapat membuat perubahan pada tingkah laku dari penerima bantuan untuk akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga bisa menghasilkan generasi yang cerdas dan sehat. Dalam tujuan jangka panjangnya, PKH diharapkan untuk menjadi pemutus rantai kemiskinan yang telah terjadi dari generasi sebelumnya (Departemen Sosial RI, 2011).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Analisis Pendapatan Usaha Mikro Penerima PKH Di Kota Padang Dan Kota Pariaman Tahun 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan antara sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 di Kota Padang?
2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan antara sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 di Kota Pariaman?
3. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan sebelum pandemi Covid-19 antara Kota Padang dan Kota Pariaman?
4. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan selama pandemi Covid-19 antara Kota Padang dan Kota Pariaman?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan antara sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 di Kota Padang
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan antara sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 di Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan antara sebelum pandemi Covid-19 di Kota Padang dan Kota Pariaman
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan antara saat pandemi Covid-19 di Kota Padang dan Kota Pariaman

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang perbedaan pendapatan usaha mikro penerima program keluarga harapan sebelum dan semasa Pandemi Covid-19 di Kota Padang dan Kota Padang Pariaman.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.